

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Ansori. 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press
- Abdul Khakim, 2006 *Aspek hukum Pengupahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian teori*, Thalia Indonesia, Bogor,.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Jakarta; Balai Pustaka
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, 1993, *Dasar-Dasar hukum perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2002, *Managemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif dan Operasional*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, 2010, Laboraturium Ilmu Hukum, Indonesia, Yogyakarta
- Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* ,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dr. Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, MH., 2009, *Dualisme Penelitian hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lalu Husni, 2001, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet,2* ,Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maimun, SH.,SPd, 2007 *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)* , PT Pramadnya Paramita, Jakarta.
- Mustaqim, 2014 *Hukum Hubungan Industrial Ketenagakerjaan*, Cet.I ,Mata Padi Presindo, Yogyakarta,
- Mustofa, SH.MKn., 2010, *Tuntunn Pembuatan Akta-akta PPAT*, Yogyakarta ; Penerbit Karya Media.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris di Indonesia ( Suatu Penjelasan)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sentonorejo Kartonegoro, 2001, *Pengupahan Teori, Hukum dan Management Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI)*, Jakarta.

Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Binapura Aksara.

Soerjono-soekamto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Tatang, M, Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Bandung.

Zaenal Asyhadie, 2012, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 83 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah R.I No. 64 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP- 231/ MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja dan Upah Lembur.

R.I.,Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1999 tentang pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

### **Karya Ilmiah**

Avissa Nova Fauzistika, 2019, Pengawasan Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Sleman, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Azwar anas , 2016 Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Pada Kantor Notaris Di Kabupaten Sleman, Tesis Magister kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Diana Rahmawati, syaifudin, Saprudin Budiman,2015, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit lahan Basah.

Filya Yatanto, 2015 Kesiapan Pelaksanaan Tempat Magang Bagi Calon Notaris Di Kota Palembang, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Leny Agustan dan Khairulnas, 2018, Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT, Yogyakarta, UII Press.
- Mukhtar, 2014 Model Penetapan Upah Minimum Pekerja, Laporan Akhir Penelitian Hibang Bersaing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rakhmad Aulia Abidin, 2015, Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Shinta Nora Pustika, 2017, Perlindungan Upah Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Wilayah Kota Yogyakarta strian Kelapa Sawit lahan Basah, Lentara, Banjarmasin.
- Silvia Akuereta. 2015 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Karyawan (BPJS) Di kota Yogyakarta. Tesis Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015 Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Ashabul Kahfi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, Makassar. Vol 3, No 2, (Desember 2016).
- Evy Safitri Gani, 2015, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia", *Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN, Ambon*, Vol 11 No 1, (Juni 2015).
- Grace Vina, 2016, "Perlindungan Pekerja / Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta Vol 11, No 5, (Juni 2015).
- Hani Regina Sari, 2018 "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2011". *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung*. Vol 5, No 1, (April 2018).
- Megarani Arsyi Andini, S.H, 2017, "Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh" *, Jurnal Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur*. Vol 15, No 2, (November 2017).

- Mesyithatul Umamah, 2019 , “Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung”, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung*, Vol 5, No 2, (Mei 2019).
- Muhammad Abas, 2017 “Analisis Pelanggaran Upah Minimum”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa barat*, Vol 2, No 1, (September 2017).
- Noviar, 2016, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Pekerja/buruh Terutama Berupa Pemenuhan Atas Upah yang Layak (Studi di Kabupaten Sanggau)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No 2, (September 2016).
- Rini Sulistiawati,2012, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”, *Jurnal EKSOS*, Vol. 8, No. 3,( Februari 2012).
- Zulkarnain Ibrahim,2015 “Pengaturan Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4. (Desember 2016).

### **Internet**

- Kartika, 2015, Sistem Administrasi dan Tata Kelola Kantor Notaris, [Hasyimososka.blogspot.co.id/2011/06/system-administrasi-dan-tata-kelola.html?m=1](http://Hasyimososka.blogspot.co.id/2011/06/system-administrasi-dan-tata-kelola.html?m=1), Jumat, 28 Desember 2018, 19:30 WIB.